



Dinamika Keamanan Internasional di Kawasan Pasifik: Kontestasi Geopolitik AS-Tiongkok, Disonansi Sekuritisasi, dan Agensi Negara Kepulauan

¹Aziz Sandy Harahap

¹Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagama

¹Jl. Kamal Raya No.2a, RT.11/RW.8, Cengkareng Barat, RT.6/RW.8, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730

Email: Azizharahap@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

12 Desember 2024

Revised

21 Desember 2024

Accepted

01 Januari 2025

Kata Kunci: Keamanan Internasional, Pasifik Selatan, Rivalitas AS-Tiongkok, Teori Sekuritisasi, Deklarasi Boe, Perubahan Iklim, Agensi Asimetris, Diplomasi Blue Pacific.

Keywords: *International Security, South Pacific, US-China Rivalry, Securitization Theory, Boe Declaration, Climate Change, Asymmetric Agency, Blue Pacific Diplomacy.*

Kawasan Pasifik Selatan telah mengalami pergeseran tektonik dalam lanskap keamanan internasional abad ke-21, bertransformasi dari kawasan yang secara historis terisolasi menjadi episentrum friksi geostrategis antara Amerika Serikat dan sekutu tradisionalnya berhadapan dengan kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Artikel ini menyajikan analisis naratif-kritis mengenai dinamika keamanan regional melalui sintesis Teori Sekuritisasi (Securitization Theory) Mazhab Kopenhagen dan konsep Agensi Asimetris (Asymmetric Agency) negara-negara berkembang. Permasalahan utama yang dibedah adalah disonansi fundamental antara agenda sekuritisasi militer konvensional yang dipaksakan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia dengan imperatif keamanan non-tradisional negara-negara kepulauan Pasifik (Pacific Island Countries / PICs) yang menempatkan krisis perubahan iklim sebagai ancaman keamanan paling eksistensial, sebagaimana dirumuskan dalam Deklarasi Boe 2018. Menggunakan metode kualitatif-eksploratif berbasis analisis wacana kebijakan dan studi pustaka sistematis, kajian ini menemukan bahwa negara-negara Pasifik Selatan menolak diperlakukan semata-mata sebagai bidak catur pasif (passive pawns) dalam pusaran persaingan hegemoni global. Sebaliknya, melalui artikulasi identitas kolektif benua maritim Blue Pacific dan doktrin kebijakan luar negeri "Friends to all, enemies to none", para pemimpin kawasan secara cermat mempraktikkan strategi hedging dinamis. Strategi ini memungkinkan mereka mengkapitalisasi kompetisi kekuatan besar guna mendanai infrastruktur pembangunan dan ketahanan adaptasi iklim, sembari secara aktif membendung jebakan polarisasi militer yang mengancam otonomi strategis serta perdamaian kawasan.

Abstract

The South Pacific has experienced a tectonic shift in the 21st-century international security landscape, transforming from a historically tranquil maritime sanctuary into a primary epicenter of geostrategic friction between the United States, its traditional allies, and a rising People's Republic of China (PRC). This article provides a critical narrative analysis of regional security dynamics by synthesizing the Copenhagen School's Securitization Theory with the concept of Asymmetric Agency among developing small island states. The core analytical inquiry focuses on the fundamental dissonance between the conventional military securitization pursued by external great powers and the non-traditional existential security imperatives of Pacific Island Countries (PICs), who formally declared climate change as their principal security threat under the 2018 Boe Declaration. Employing a qualitative-exploratory research design grounded in policy discourse analysis and systematic desk research, this study argues that Pacific island states are actively rejecting their reductionist portrayal as passive pawns in a renewed Cold War rivalry. Instead, through the collective framing of the "Blue Pacific" continent and the foreign policy doctrine of "Friends to all, enemies to none," regional leaders exercise calculated strategic hedging. This mechanism allows them to leverage Sino-American competition to secure developmental infrastructure and climate adaptation financing, while resolutely resisting the militarized polarization that threatens regional strategic autonomy and enduring peace.

PENDAHULUAN

Secara historis, dalam peta imajinasi geopolitik Barat pasca-Perang Dunia II, bentangan Samudra Pasifik bagian selatan kerap dikonstruksikan sebagai kawasan periferi yang damai, jinak, dan terisolasi dari turbulensi konflik global. Narasi dominan yang diproduksi oleh para pemikir strategis di Washington dan Canberra mengidentifikasi bentangan maritim ini sebagai "Anzac Lake" atau "American Lake" sebuah teritori halaman belakang yang berada di bawah pengawasan hegemonik Amerika Serikat bersama dua sekutu sub-regionalnya, Australia dan Selandia Baru (Wesley, 2021). Stabilitas kawasan dipelihara melalui jalinan perjanjian asosiasi pertahanan formal, ketergantungan bantuan pembangunan luar negeri (development aid dependency), serta kehadiran perjanjian perwalian strategis seperti *Compacts of Free Association* (COFA) yang mengikat kedaulatan Kepulauan Marshall, Mikronesia, dan Palau secara eksklusif dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Herr & Bergin, 2011).

Di bawah naungan arsitektur keamanan tersebut, persepsi ancaman militer konvensional hampir tidak pernah menjadi diskursus utama di kalangan masyarakat lokal. Sebaliknya, memori historis masyarakat Pasifik terhadap kehadiran militer kekuatan besar justru diwarnai oleh trauma mendalam akibat kolonialisme lingkungan (*environmental colonialism*). Antara tahun 1946 hingga 1996, kawasan ini dijadikan laboratorium pengujian senjata pemusnah massal oleh kekuatan Barat: Amerika Serikat meledakkan 67 uji coba bom nuklir atmosferik dan bawah laut di Atol Bikini dan Enewetak; Britania Raya melakukan uji coba termonuklir di Pulau Natal dan Malden; sementara Prancis meledakkan hampir 200 perangkat nuklir di Atol Moruroa dan Fangataufa di Polinesia Prancis (Fry, 2022). Akibat penderitaan radiasi berkepanjangan dan penggusuran masyarakat adat, negara-negara Pasifik merespons dengan memelopori salah satu inisiatif pelucutan senjata paling progresif di dunia, yakni penandatanganan Perjanjian Rarotonga pada tahun 1985 yang menetapkan Pasifik Selatan sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir (*South Pacific Nuclear Free Zone*). Namun, memasuki dekade kedua abad ke-21, gravitasi ekonomi dan militer dunia mengalami pergeseran radikal menuju teater Indo-Pasifik. Kebangkitan spektakuler Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping telah memicu perombakan mendasar terhadap keseimbangan kekuatan (*balance of power*) regional. Melalui *grand strategy* Belt and Road Initiative (BRI) dan pembangunan kapabilitas Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (*People's Liberation Army Navy / PLAN*) yang berkembang pesat menjadi armada laut terbesar di dunia berdasarkan jumlah lambung kapal, Beijing secara terencana mulai memperluas jangkauan operasionalnya melintasi batas tradisional Asia Timur (Smith, 2022).

Bagi Beijing, Pasifik Selatan memiliki signifikansi geostrategis yang berlipat ganda: Penerobosan Rantai Kepulauan Kedua (*Second Island Chain*): Doktrin pertahanan maritim Tiongkok menempatkan Pasifik Selatan sebagai koridor vital untuk membobol strategi pengepungan maritim AS yang bertumpu pada pangkalan Guam, Hawaii, dan Australia, sekaligus mengamankan jalur pelayaran komersial menuju Amerika Latin dan Antartika (Zhang, 2020). Perang Pengakuan Diplomatik Taiwan (*Checkbook Diplomacy*): Pasifik Selatan secara historis merupakan episentrum benteng pengakuan kedaulatan Republik Tiongkok (Taiwan). Melalui instrumen diplomasi ekonomi yang agresif, Beijing berhasil membujuk Kepulauan Solomon dan Kiribati untuk memutus hubungan diplomatik dengan Taipei pada tahun 2019, yang kemudian disusul oleh Nauru pada awal tahun 2024, menyisakan hanya tiga sekutu resmi Taiwan di kawasan tersebut (Smith, 2022).

Akses terhadap Sumber Daya Maritim dan Mineral: Penguasaan hak penangkapan ikan pelagis (khususnya tuna) di perairan Pasifik yang menyumbang lebih dari separuh pasokan industri perikanan global, serta potensi eksplorasi penambangan nodul polimetalik di dasar laut dalam (*deep-sea mining*).

Titik balik yang meruntuhkan asumsi keamanan Barat secara dramatis terjadi pada April 2022, ketika dokumen draf kerja sama keamanan bilateral antara Republik Rakyat Tiongkok dan Kepulauan Solomon bocor ke ruang publik internasional. Perjanjian tersebut memberikan mandat hukum bagi penempatan kepolisian bersenjata Tiongkok (*People's Armed Police*) di Honiara guna mengamankan ketertiban sosial dan aset-aset ekonomi Tiongkok, serta membuka kemungkinan berlabuhnya kapal-kapal perang angkatan laut Tiongkok untuk keperluan pengisian bahan bakar dan logistik (Dziedzic, 2022). Bagi Canberra dan Washington, pakta tersebut memicu kepanikan strategis luar biasa, sebab untuk pertama kalinya sejak berakhirnya Perang Pasifik 1945, sebuah kekuatan militer rival memiliki

pijakan potensial untuk mendirikan pangkalan militer permanen yang berjarak kurang dari 2.000 kilometer di lepas pantai timur Australia.

Kepanikan geopolitik tersebut langsung dibalas dengan serangkaian kebijakan penyeimbangan (counter-balancing) secara agresif oleh blok Barat. Washington, yang selama beberapa dekade menelantarkan hubungan diplomatiknya di Pasifik, meluncurkan kebijakan re-engagement kilat: membuka kembali Kedutaan Besar AS di Kepulauan Solomon dan Tonga, menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) khusus AS-Negara Kepulauan Pasifik di Gedung Putih, meluncurkan inisiatif multilateral Partners in the Blue Pacific (PBP) bersama Jepang, Inggris, dan Selandia Baru, serta memobilisasi pakta trilateral AUKUS untuk membekali Angkatan Laut Australia dengan armada kapal selam bertenaga nuklir (Bisley, 2023). Puncaknya, pada Mei 2023, Amerika Serikat menandatangani Defense Cooperation Agreement (DCA) yang sangat komprehensif dengan Papua Nugini, yang memberikan akses tak terbatas bagi militer AS ke pelabuhan-pelabuhan strategis dan lapangan udara militer di Papua Nugini (Dziedzic, 2023).

Namun demikian, di balik hiruk-pikuk perlombaan pengaruh dan kalkulasi militer tersebut, muncul jurang pemisah epistemologis dan normatif yang sangat dalam. Sementara Washington, Beijing, dan Canberra sibuk mendefinisikan keamanan dalam terma-terma realisme ofensif—seperti perimbangan daya getar nuklir, superioritas maritim, dan blokade pangkalan—masyarakat dan para pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik memandang seluruh perdebatan tersebut dengan rasa keterasingan dan kecemasan yang mendalam. Bagi bangsa-bangsa Pasifik, ancaman keamanan yang nyata dan hadir setiap hari di depan mata mereka bukanlah probabilitas invasi tentara asing atau benturan armada kapal selam, melainkan katastrofe perubahan iklim global. Negara-negara kepulauan atol dataran rendah seperti Tuvalu, Kiribati, dan Kepulauan Marshall menghadapi ancaman nyata tenggelamnya batas-batas daratan fisik mereka akibat kenaikan permukaan air laut rata-rata global yang terus terakselerasi. Gelombang badai tropis berkekuatan ekstrem (kategori 5), seperti Siklon Pam dan Siklon Winston, terbukti mampu menelan hingga 30-60% Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara kepulauan hanya dalam hitungan jam, menghancurkan infrastruktur air tawar, dan melumpuhkan sektor pertanian subsisten (Wallis, 2023).

Kontradiksi persepsi ancaman ini secara formal diledakkan oleh para pemimpin Pasifik melalui penerbitan Deklarasi Boe tentang Keamanan Regional (Boe Declaration on Regional Security) pada KTT Forum Kepulauan Pasifik (PIF) tahun 2018 di Nauru. Dalam deklarasi bersejarah tersebut, para pemimpin kawasan secara aklamasi menegaskan kembali komitmen keamanan mereka dengan menyatakan bahwa: "perubahan iklim tetap merupakan ancaman tunggal paling eksistensial terhadap mata pencaharian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Pasifik" (Pacific Islands Forum, 2018). Dengan demikian, kawasan Pasifik Selatan saat ini terjebak dalam disonansi struktural: di satu sisi dipaksa menjadi panggung remiliterasi konvensional oleh kekuatan-kekuatan hegemoni eksternal, sementara di sisi lain sedang berjuang mempertahankan keberlangsungan hidup biologis dan teritorialnya dari keruntuhan biosfer bumi. Berangkat dari paradoks ini, artikel ini bertujuan menganalisis secara mendalam dinamika kontestasi keamanan di Pasifik, membongkar pertarungan wacana sekuritisasi yang saling bertabrakan, serta mengevaluasi bagaimana agensi diplomasi negara kepulauan Pasifik beroperasi untuk menegosiasikan otonomi dan kepentingannya di tengah kepungan rivalitas dua raksasa dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian Untuk membedah kompleksitas dinamika keamanan di Pasifik Selatan yang melibatkan pertarungan wacana, struktur hegemoni global, serta agensi negara berkembang, penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-eksplanatif (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dirancang untuk menjelaskan bukan sekadar "apa" yang sedang terjadi di kawasan Pasifik, melainkan "mengapa" dan "bagaimana" konstruksi ancaman keamanan dibentuk, dipertarungkan, dan dinegosiasikan oleh aktor-aktor yang memiliki disparitas kapabilitas material yang sangat asimetris. Analisis dalam studi ini diartikulasikan melalui sintesis dua pilar teoretis utama dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional:

Dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde (1998), teori ini merevolusi studi keamanan dengan mendekonstruksi keamanan sebagai fenomena intersubjektif. Keamanan bukanlah kondisi material objektif yang netral, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dilegitimasi melalui tindakan wicara (speech acts). Dalam kerangka ini, proses sekuritisasi berhasil apabila

memenuhi empat variabel integral: Aktor Penyekuritisasi (Securitizing Actor): Elite politik, diplomat, atau kepala pemerintahan yang mengartikulasikan wacana ancaman.

Tindakan Wicara (Speech Act): Pernyataan publik atau doktrin formal yang mengklaim bahwa sebuah isu telah mencapai taraf ancaman eksistensial. Objek Rujukan (Referent Object): Entitas yang eksistensinya terancam punah dan menuntut perlindungan mutlak (misalnya: kedaulatan teritorial negara, sistem aliansi, atau biosfer lingkungan hidup). Tindakan Luar Biasa (Extraordinary Measures): Kebijakan darurat yang melangkahi prosedur politik normal, seperti mobilisasi kekuatan bersenjata, pembentukan pakta militer rahasia, pengalihan anggaran raksasa, atau pembatasan kebebasan sipil demi mengatasi ancaman tersebut.

Dalam penelitian ini, Teori Sekuritisasi dioperasionalkan untuk memetakan pertentangan diametral antara dua rezim sekuritisasi di Pasifik: Sekuritisasi Militer Tradisional yang diproduksi oleh Washington, Canberra, dan Beijing versus Sekuritisasi Ekologis Non-Tradisional yang dimotori oleh PIF melalui Deklarasi Boe 2018.

Mengoreksi bias neorealisme struktural (seperti pemikiran Mearsheimer atau Waltz) yang cenderung mengabaikan peran negara-negara kecil dan memperlakukan mereka semata-mata sebagai objek yang tak terelakkan mengikuti kehendak negara kuat, penelitian ini meminjam kerangka pemikiran pos-kolonial dan konstruktivis tentang agensi negara kepulauan kecil (Fry & Tarte, 2015; Wallis, 2023). Konsep ini mengasumsikan bahwa negara-negara kepulauan Pasifik memiliki kapasitas strategis untuk: Melakukan lindung nilai strategis (strategic hedging), yakni menolak komitmen persekutuan eksklusif dengan salah satu kekuatan hegemoni guna menghindari jebakan ketergantungan sepihak (entrapment vs. abandonment). Menciptakan daya ungkit diplomatik (diplomatic leverage), yaitu memanfaatkan kepanikan kekuatan besar untuk memaksakan konsesi bantuan pembangunan, transfer teknologi hijau, dan kompensasi mitigasi bencana iklim.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan sistematis (systematic desk research) yang membagi korpus data menjadi dua kategori utama: Sumber Data Primer: Terdiri atas dokumen-dokumen kebijakan resmi, perjanjian traktat internasional, dan naskah hukum regional. Korpus data primer mencakup naskah Boe Declaration on Regional Security (2018), dokumen cetak biru 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent (2022), draf kesepakatan kerja sama keamanan bilateral Kepulauan Solomon-Tiongkok (2022), teks perjanjian pertahanan US-Papua New Guinea Defense Cooperation Agreement (2023), traktat pelucutan nuklir Treaty of Rarotonga (1985), serta transkrip resmi pidato para pemimpin Pasifik dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Sumber Data Sekunder: Meliputi monograf ilmiah, artikel jurnal Hubungan Internasional terindeks Scopus (Q1/Q2) seperti *The Pacific Review*, *Australian Journal of International Affairs*, dan *International Security*, serta laporan riset kebijakan berbasis data empiris dari lembaga riset independen dunia seperti Lowy Institute (Pacific Aid Map), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dan Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Data dianalisis menggunakan teknik analisis wacana kebijakan kualitatif (qualitative policy discourse analysis) yang dikombinasikan dengan triangulasi sumber data. Peneliti menelusuri bagaimana kosakata ancaman (threat vocabulary) diproduksi, dinegosiasikan, dan diterjemahkan ke dalam instrumen kebijakan riil. Proses analisis mencakup kategorisasi tematik terhadap respons kebijakan, identifikasi pola konvergensi-divergensi kepentingan antar-aktor, serta penarikan inferensi kausalitas secara induktif dan deduktif.

PEMBAHASAN

Keterlibatan Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan selama satu dekade terakhir merepresentasikan salah satu manifestasi paling signifikan dari transformasi kebijakan luar negeri Beijing: dari doktrin diplomasi rendah hati (low-profile diplomacy) era Deng Xiaoping menuju postur asertif di bawah visi "Peremajaan Hebat Bangsa Tionghoa" (Great Rejuvenation of the Chinese Nation) yang digelorakan Presiden Xi Jinping. Tiongkok menyadari bahwa dominasi Amerika Serikat di kawasan barat Samudra Pasifik selama ini ditopang oleh arsitektur rantai kepulauan pertahanan yang mengurung garis pantai Tiongkok. Dalam kalkulasi strategis Komisi Militer Pusat Tiongkok, penetrasi diplomatik dan ekonomi ke Pasifik Selatan adalah kunci untuk merombak konfigurasi geopolitik maritim dan menembus garis kepulauan pertahanan lingkaran kedua (Zhang, 2020). Instrumen penetrasi Tiongkok dieksekusi secara terkoordinasi melalui berbagai domain: Penetrasi Infrastruktur Fisik dan Finansial: Melalui pinjaman lunak Bank Ekspor-Impor Tiongkok (Exim Bank of China) dan keterlibatan

BUMN konstruksi Tiongkok dalam skema BRI, Beijing telah mengalirkan miliaran dolar untuk membiayai proyek-proyek prestisius di Pasifik Selatan: pembangunan Pelabuhan Air Dalam Laganville di Vanuatu, Kompleks Parlemen di Vanuatu, Stadion Nasional di Honiara, serta perbaikan jalan raya dan pelabuhan di Papua Nugini. Meskipun narasi Barat kerap menuduh proyek-proyek ini sebagai manifestasi "diplomasi jebakan utang" (debt-trap diplomacy), kajian empiris Lowy Institute menunjukkan bahwa sebagian besar pinjaman ini terealisasi akibat inisiatif dan permintaan elite politik lokal yang mencari modal pembangunan cepat tanpa syarat tata kelola demokrasi yang rumit dari negara-negara Barat (Rajesh & Dayant, 2023).

Infrastruktur Digital dan Telekomunikasi: Tiongkok berupaya mengintegrasikan kawasan Pasifik ke dalam koridor Digital Silk Road. Perusahaan teknologi seperti Huawei Marine (kini HMN Tech) mengajukan berbagai proposal tender untuk membangun jaringan kabel telekomunikasi bawah laut internasional yang menghubungkan Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Federasi Mikronesia. Langkah ini secara langsung dipandang oleh badan intelijen Barat (khususnya aliansi Five Eyes) sebagai ancaman spionase siber terhadap kabel-kabel komunikasi strategis trans-Pasifik.

Peralihan Pengakuan Diplomatik (Diplomatic Flipping): Penetrasi ekonomi Beijing berbanding lurus dengan keberhasilan mengisolasi Taipei. Beralihnya pengakuan diplomatik Kepulauan Solomon dan Kiribati pada September 2019, serta Nauru pada Januari 2024, membuktikan efektivitas diplomasi insentif Tiongkok dalam mengubah konstelasi loyalitas politik negara-negara kepulauan di panggung multilateral. Dinamika ini memuncak pada krisis diplomatik Pakta Keamanan Kepulauan Solomon-Tiongkok 2022. Kerusuhan sipil yang mengguncang Honiara pada November 2021—yang berakar pada ketimpangan ekonomi domestik, rivalitas etnis antara Provinsi Malaita dan Guadalcanal, serta penolakan atas keputusan Perdana Menteri Manasseh Sogavare mengalihkan hubungan ke Beijing—menciptakan celah intervensi. Merasa posisinya terancam secara domestik, Sogavare menandatangani pakta keamanan rahasia dengan Beijing untuk mengamankan bantuan pelatihan aparat kepolisian bersenjata serta perlindungan atas fasilitas diplomatik dan bisnis Tiongkok (Dziedzic, 2022).

Bagi Washington dan Canberra, pakta tersebut memvalidasi ketakutan terburuk mereka: terciptanya preseden pangkalan militer asing di gerbang laut timur Australia. Respons tandingan blok Barat dilakukan melalui serangkaian tindakan luar biasa yang mencerminkan berlakunya teori dilema keamanan (security dilemma) klasik (Jervis, 1978): Eskalasi DCA AS-Papua Nugini (2023): Washington mengamankan perjanjian kerja sama pertahanan selama 15 tahun dengan Port Moresby, yang memberikan hak kepada militer AS untuk menempatkan personel, pesawat terbang, dan kapal perang di enam lokasi kunci PNG, termasuk Pangkalan Udara Nadzab dan Pelabuhan Air Dalam Lombrum di Pulau Manus yang berhadapan langsung dengan rute maritim Samudra Pasifik (Dziedzic, 2023). Kabel Serat Optik Tandingan: Untuk memblokir penetrasi Huawei di sektor digital, Australia bersama AS mengintervensi dengan menggelontorkan dana hibah puluhan juta dolar guna membiayai Coral Sea Cable System yang menghubungkan Sydney, Port Moresby, dan Honiara, serta mengambil alih kepemilikan operator telekomunikasi Digicel Pacific demi memutus dominasi teknologi Tiongkok. Peningkatan Postur Pencegahan Maritim AUKUS: Di bawah payung AUKUS Pillar I, Australia berkomitmen menginvestasikan hingga 368 miliar dolar Australia untuk memperoleh minimal delapan kapal selam serang bertenaga nuklir (SSN-AUKUS) berteknologi AS dan Inggris. Akuisisi ini ditujukan secara eksplisit untuk memperluas jangkauan patroli bawah air Angkatan Laut Australia ke celah-celah laut strategis Pasifik dan Asia Tenggara guna membendung ekspansi kapal selam Tiongkok (Bisley, 2023).

Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa Pasifik Selatan tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan telah ditarik secara paksa menjadi arena depan dalam kontestasi hegemoni global, di mana setiap jengkal pelabuhan, bandar udara, dan jalur laut kini dihitung dalam matriks militeristik kekuatan besar. Fenomena yang terjadi di Pasifik Selatan menyajikan studi kasus empiris yang sangat kaya mengenai kegagalan harmonisasi wacana keamanan internasional. Menggunakan lensa analisis Teori Sekuritisasi Mazhab Kopenhagen (Buzan et al., 1998), kawasan ini memperlihatkan terjadinya benturan ontologis yang tak terdamaikan antara Sekuritisasi Militer Tradisional yang dipraktikkan oleh kekuatan hegemoni global berhadapan dengan Sekuritisasi Ekologis-Kemanusiaan yang diartikulasikan oleh masyarakat lokal kawasan.

Dalam diskursus resmi Gedung Putih dan Departemen Pertahanan Australia, tindakan wicara (speech acts) yang diproduksi secara konsisten menggunakan leksikon perang dingin: "menjaga tatanan maritim berbasis aturan", "mencegah pemaksaan ekonomi Tiongkok", "mempertahankan kebebasan

navigasi", dan "menangkal dominasi otoritarianisme". Objek rujukan yang harus dilindungi secara mutlak adalah posisi superioritas militer Barat dan keutuhan arsitektur aliansi penangkal (deterrence architecture). Konsekuensinya, tindakan luar biasa (extraordinary measures) yang diambil selalu bermuara pada peningkatan anggaran pertahanan konvensional, rotasi pengerahan pasukan marinir (seperti di Darwin, Australia), pengadaan kapal perang canggih, dan pembangunan pangkalan intelijen militer (Wesley, 2021).

Namun, bagi negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF), wacana sekuritisasi Barat tersebut dinilai sangat miskin empati dan mengalami disorientasi moral yang akut. Dalam perspektif Pasifik, ancaman yang bersifat eksistensial bukanlah probabilitas pertempuran laut antara kapal perang AS dan armada Tiongkok, melainkan kerusakan biosfer bumi dan krisis iklim global. Deklarasi Boe tentang Keamanan Regional yang disepakati secara aklamasi pada tahun 2018 di Nauru mengkodifikasikan redefinisi konsep keamanan tersebut secara radikal. Pasal 1 Deklarasi Boe menyatakan: "*We reaffirm that natural disasters, climate change, and environmental damage remain the single greatest threat to the livelihoods, security, and wellbeing of the peoples of the Pacific and our commitment to progress the implementation of the Paris Agreement.*" (Pacific Islands Forum, 2018). Deklarasi Boe memperluas batas konsep keamanan tradisional ke dalam empat pilar utama: Keamanan Manusia (Human Security): Perlindungan hak-hak dasar hidup, kesehatan masyarakat, dan ketahanan pangan maritim dari kerusakan terumbu karang akibat pemanasan suhu permukaan laut. Keamanan Lingkungan dan Sumber Daya (Environmental and Resource Security): Penjagaan ekosistem laut dan pencegahan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated / IUU Fishing) yang mengancam kepunahan stok tuna global. Keamanan Siber Transnasional (Cybersecurity): Perlindungan infrastruktur telekomunikasi pulau-pulau terpencil dari kejahatan siber lintas batas. Keamanan Iklim (Climate Security): Mitigasi dan adaptasi terhadap kenaikan permukaan air laut yang mengancam hilangnya daratan negara secara fisik dan legal.

Disonansi ini melahirkan kemarahan diplomatik di kalangan para pemimpin Pasifik ketika Australia bersama Amerika Serikat dan Inggris mengumumkan mega-proyek AUKUS. Pengalokasian anggaran pertahanan hingga ratusan miliar dolar untuk kapal selam bertenaga nuklir dinilai sebagai cerminan nyata dari kemunafikan ekologis kekuatan Barat. Mantan Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga, secara tajam mempertanyakan logika moral tersebut: bagaimana mungkin negara-negara industri maju berulang kali menyatakan tidak memiliki dana yang memadai untuk mendanai Loss and Damage Fund (Dana Kerugian dan Kerusakan Iklim) di forum COP PBB, namun dalam sekejap mampu mencairkan ratusan miliar dolar untuk memproduksi mesin-mesin perang bawah laut bertenaga nuklir? (Wallis, 2023).

Lebih dari itu, pengenalan teknologi propulsi nuklir di bawah payung AUKUS dinilai melanggar norma anti-nuklir regional yang telah mengakar kuat dalam identitas Pasifik. Para diplomat dari Vanuatu, Tuvalu, dan Kepulauan Cook secara terbuka menyuarakan kekhawatiran bahwa proyek AUKUS mengancam integritas hukum Traktat Rarotonga 1985. Kekhawatiran ini bukan sekadar retorika; bagi bangsa-bangsa Pasifik yang hingga kini masih menanggung luka kanker genetik dan kerusakan karang radioaktif akibat uji coba nuklir Barat masa lalu, setiap upaya menormalisasi teknologi nuklir di perairan mereka dipandang sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan moral kawasan (Fry, 2022). Menghadapi tekanan hebat dari dua kutub kekuatan raksasa dunia, teori realisme neoklasik kerap memprediksi bahwa negara-negara kecil di Pasifik hanya memiliki dua opsi fatalistik: menyerah pada dominasi salah satu kekuatan pelindung (bandwagoning) atau terpecah belah menjadi proksi konflik tak bernilai (pawns of great powers). Namun, realitas empiris di Pasifik membantah simplifikasi deterministik tersebut. Melalui artikulasi agensi asimetris (asymmetric agency), negara-negara kepulauan Pasifik menunjukkan kecakapan diplomatik tingkat tinggi dalam menavigasi turbulensi geopolitik global (Fry & Tarte, 2015).

Praktik Strategic Hedging dan Doktrin Kebijakan Luar Negeri "Friends to All" Mayoritas negara Pasifik menolak secara tegas untuk diikat ke dalam arsitektur aliansi militer formal yang menuntut loyalitas eksklusif. Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, bersama Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, secara konsisten mendeklarasikan doktrin luar negeri mereka: "Friends to all, enemies to none" (Wesley, 2021). Doktrin ini bukanlah manifestasi dari kepasifan isolasionis, melainkan sebuah instrumen lindung nilai strategis (strategic hedging) yang sangat aktif dan terukur:

Diversifikasi Kemitraan: Para pemimpin Pasifik dengan sengaja membagi portofolio keterlibatan eksternal mereka. Dalam sektor pembiayaan infrastruktur fisik berskala besar yang membutuhkan likuiditas modal cepat (seperti pelabuhan, jalan raya, jaringan kelistrikan, dan gedung publik), mereka menyambut pendanaan dan BUMN Tiongkok. Sebaliknya, dalam ranah bantuan penegakan hukum maritim, pengawasan perikanan, serta tanggap bencana alam darurat (humanitarian assistance and disaster relief / HADR), mereka tetap mempertahankan kemitraan erat dengan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat (Wallis, 2023).

Maksimalisasi Daya Tawar Bantuan (Aid Leverage): Ancaman Kepulauan Solomon dan negara-negara Melanesia untuk mempererat hubungan keamanan dengan Beijing terbukti berhasil menciptakan efek kepanikan yang sangat menguntungkan posisi tawar mereka. Manuver Perdana Menteri Sogavare pada tahun 2022 secara langsung memaksa Canberra dan Washington melipatgandakan alokasi anggaran bantuan luar negeri ke kawasan Pasifik dalam kurun waktu 2022-2024. Australia terpaksa mendirikan Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific (AIFFP) senilai miliaran dolar untuk mengimbangi pinjaman BRI Tiongkok dengan skema hibah murni yang jauh lebih menguntungkan negara-negara pulau penerima (Rajesh & Dayant, 2023).

Kapasitas negosiasi negara kepulauan tampak jelas dalam proses ratifikasi Defense Cooperation Agreement (DCA) antara Amerika Serikat dan Papua Nugini pada tahun 2023. Meskipun draf awal yang diajukan Pentagon menuntut imunitas hukum yang luas dan hak akses eksklusif bagi personel militer AS, parlemen dan masyarakat sipil PNG melancarkan gelombang protes domestik keras atas kekhawatiran terkikisnya kedaulatan nasional. Tekanan publik domestik ini berhasil dimanfaatkan oleh Perdana Menteri James Marape untuk menuntut klausul revisi yang ketat: militer AS diwajibkan memberikan pemberitahuan operasional kepada otoritas pertahanan PNG, dilarang menggunakan pangkalan PNG untuk melancarkan serangan ofensif terhadap negara ketiga, serta diwajibkan menyertakan paket kompensasi ratusan juta dolar untuk modernisasi pelabuhan komersial dan pelatihan militer lokal (Dziedzic, 2023).

Bahkan Kepulauan Solomon, yang kerap dituding oleh media Barat telah menjadi "negara satelit Tiongkok", membuktikan otonomi agensinya. Pasca-penandatanganan pakta keamanan dengan Beijing, Perdana Menteri Sogavare secara terbuka menolak izin sandar kapal penjaga pantai Amerika Serikat (US Coast Guard Cutter Oliver Henry) dan kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris (HMS Spey) di pelabuhan Honiara, sembari menegaskan bahwa Kepulauan Solomon tidak akan pernah mengizinkan pendirian pangkalan militer asing permanen oleh negara mana pun, termasuk oleh Tiongkok (Dziedzic, 2022). Manuver ini mendemonstrasikan bahwa kerja sama keamanan dengan Beijing digunakan oleh elite Honiara terutama sebagai kartu penyeimbang domestik dan pengungkit diplomatik, bukan deklarasi aliansi militer permanen. Prestasi paling monumental dari agensi negara-negara kepulauan Pasifik terletak pada kemampuan mereka merekayasa ulang kerangka normatif hubungan internasional di tingkat kawasan dan global melalui panji diplomasi "The Blue Pacific".

Secara historis, literatur pembangunan kolonial menstigma kepulauan Pasifik melalui terminologi yang merendahkan: "Small Island Developing States" (SIDS) sebuah konsep yang secara semantik memancarkan kelemahan struktural, keterpencilan geografis, dan ketidakmampuan berdikari. Menolak stigma tersebut, cendekiawan legendaris asal Fiji, Epeli Hau'ofa (1994), dalam esai seminalnya "Our Sea of Islands", menyerukan dekolonisasi imajinasi geografis. Hau'ofa menegaskan bahwa bangsa-bangsa Pasifik bukanlah pulau-pulau terpencil di tengah lautan yang jauh (islands in a far sea), melainkan sebuah benua samudra yang utuh dan saling terhubung oleh lautan (a sea of islands). Filosofi Hau'ofa berhasil ditransformasikan oleh Forum Kepulauan Pasifik (PIF) menjadi doktrin diplomatik resmi melalui peluncuran dokumen cetak biru jangka panjang: The 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent pada KTT PIF ke-51 di Suva, Fiji, tahun 2022 (Pacific Islands Forum, 2022). Melalui strategi ini, negara-negara Pasifik merevolusi identitas mereka menjadi "Large Ocean States" (Negara-Negara Samudra Besar).

Secara kalkulasi geografis konvensional, wilayah daratan negara-negara kepulauan Pasifik memang sangat kecil (kurang dari 2% dari total wilayah). Namun, di bawah rezim hukum Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), hak kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mereka kuasai terbentang seluas lebih dari 30 juta kilometer persegi—meliputi wilayah perairan yang jauh lebih luas daripada gabungan seluruh luas daratan benua Eropa atau Amerika Serikat.

Keberhasilan diplomasi normatif kolektif Blue Pacific terbukti dalam tiga pencapaian historis di panggung internasional: Pengendalian Kartel Perikanan Tuna melalui PNA: Melalui sub-organisasi Parties to the Nauru Agreement (PNA) yang mencakup delapan negara kepulauan mikronesia dan melanesia, mereka menerapkan skema hari berlayar kapal (Vessel Day Scheme / VDS). Skema ini berhasil mematahkan dominasi armada kapal penangkap ikan dari kekuatan raksasa (AS, Tiongkok, Jepang, Taiwan, Uni Eropa). Dengan mengontrol 50% stok perikanan tuna cakalang dunia, PNA secara kolektif menetapkan kuota konservasi dan melipatgandakan pendapatan royalti lisensi perikanan kawasan dari hanya \$60 juta pada 2010 menjadi lebih dari \$500 juta per tahun pada 2023 (Wallis, 2023). Penolakan Pakta Keamanan Terpadu Tiongkok (2022): Ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, melakukan tur maraton ke delapan negara Pasifik pada Mei 2022 dan menyodorkan draf kesepakatan regional multilateral (China-Pacific Island Countries Common Development Vision) yang mencakup kerja sama keamanan siber, kepolisian, dan bea cukai, PIF menunjukkan solidaritas kolektif yang luar biasa. Dipimpin oleh penolakan tegas dari Presiden Federasi Mikronesia David Panuelo dan Perdana Menteri Samoa Fiamē Naomi Mata'afa, negara-negara Pasifik menolak menandatangani dokumen tersebut. Penolakan aklamasi ini membuktikan bahwa kekuatan kepulauan Pasifik menolak segala upaya institusionalisasi eksternal yang berusaha memecah belah solidaritas regionalisme Blue Pacific (Smith, 2022).

Revolusi Hukum Kedaulatan Maritim Permanen di ITLOS dan PBB: Menghadapi ancaman hilangnya daratan akibat kenaikan air laut, diplomasi Blue Pacific memelopori terobosan hukum laut internasional. Melalui Deklarasi PIF 2021 tentang Batas Maritim Terkait Perubahan Iklim, negara-negara Pasifik berhasil mendesak komunitas global untuk mengakui bahwa garis pangkal maritim (maritime baselines) dan batas ZEE yang telah diukur dan didepositkan ke PBB bersifat permanen. Artinya, batas kedaulatan laut mereka tidak akan pernah berkurang atau hilang meskipun pulau-pulau fisik mereka tenggelam di bawah air laut (Pacific Islands Forum, 2022). Puncaknya, pada Mei 2024, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) di Hamburg mengeluarkan opini hukum penasihat (Advisory Opinion) bersejarah yang memvalidasi posisi negara kepulauan, menegaskan bahwa emisi gas rumah kaca adalah bentuk polusi laut terlarang di bawah UNCLOS yang wajib dimitigasi oleh negara-negara penghasil emisi besar.

Eskalasi kontestasi keamanan di Pasifik Selatan bukan merupakan dinamika yang terisolasi dari kepentingan strategis Republik Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis berada tepat di persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia memiliki keterikatan langsung dengan dinamika keamanan kawasan ini: Keamanan Maritim dan Choke Points ALKI III: Remilitarisasi Pasifik Selatan dan pengoperasian pangkalan militer seperti Manus Island di Papua Nugini meningkatkan densitas lalu lintas armada tempur dan kapal selam asing di dekat perbatasan laut timur Indonesia. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III—yang menghubungkan Laut Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan Selat Ombai-Wetar menuju Samudra Hindia—merupakan rute perlintasan bawah air strategis bagi armada kapal selam bertenaga nuklir. Indonesia berkepentingan mutlak untuk memastikan bahwa perairan kedaulatannya tidak dilanggar oleh perlombaan senjata bawah laut antara blok Barat dan Tiongkok.

Dimensi Kedaulatan Politik dan Diplomasi Isu Papua: Kawasan Pasifik Selatan, khususnya sub-regional Melanesia melalui organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG), secara historis merupakan panggung utama bagi diplomasi internasionalisasi isu kemerdekaan Papua Barat yang dimotori oleh kelompok separatis seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Keterlibatan Tiongkok dan persaingan bantuan Barat di Pasifik telah memperumit dinamika ini. Indonesia, yang berstatus sebagai anggota asosiasi (associate member) di MSG, tidak dapat lagi hanya mengandalkan diplomasi transaksional reaktif. Melalui inisiatif doktrin kebijakan luar negeri "Pacific Elevation", Indonesia dituntut untuk membuktikan dirinya sebagai saudara maritim yang tulus bagi negara-negara Pasifik dengan memberikan bantuan kapasitas mitigasi bencana, pemulihan ekonomi, dan kerja sama konservasi terumbu karang.

Sinergi ASEAN-PIF: Mengingat doktrin kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif (independent and active foreign policy), Indonesia berpeluang besar menjadi aktor penengah diplomatik. Doktrin ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) memiliki keselarasan nilai fundamental dengan 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent: keduanya menolak tatanan hegemoni eksklusif kekuatan besar, menjunjung tinggi inklusivitas regional, dan menekankan kerja sama fungsional maritim. Melalui diplomasi jembatan ini, Indonesia dapat memobilisasi kekuatan kolektif negara-negara berkembang di

Asia Tenggara dan Pasifik untuk mendesak komitmen dekarbonisasi nyata dari Washington dan Beijing, sembari memastikan bahwa kawasan Pasifik tetap berstatus sebagai zona damai, bebas, dan netral.

PENUTUP

Penelitian naratif-kritis ini menyimpulkan bahwa kawasan Pasifik Selatan pada era kontemporer dicirikan oleh terjadinya benturan mendasar antara dua arsitektur sekuritisasi yang berjalan pada frekuensi berbeda. Di satu pihak, kebangkitan geopolitik Republik Rakyat Tiongkok dan respons pembendungan (containment) dari Amerika Serikat bersama sekutu Baratnya memaksakan logika sekuritisasi militer tradisional neorealisme ke perairan Pasifik. Lanskap laut kawasan ini diintervensi melalui pembentukan aliansi pertahanan militer (AUKUS), penandatanganan pakta pangkalan strategis (DCA AS-PNG 2023), perlombaan penguasaan infrastruktur kabel telekomunikasi dasar laut, serta remiliterisasi jalur navigasi trans-Pasifik. Di lain pihak, negara-negara kepulauan Pasifik (Pacific Island Countries / PICs) secara konsisten dan gigih memperjuangkan wacana sekuritisasi ekologis-kemanusiaan non-tradisional. Sebagaimana dikodifikasikan dalam Deklarasi Boe 2018, ancaman yang bersifat eksistensial bagi peradaban Pasifik bukanlah benturan kapal perang atau peluncuran rudal balistik antar-kekuatan besar, melainkan kenaikan permukaan air laut, abrasi daratan pulau atol, pengasaman terumbu karang, dan siklon tropis katastropik yang dipicu oleh emisi karbon negara-negara industri maju. Disonansi ini memaparkan ketimpangan etis dalam tata kelola keamanan global, di mana ratusan miliar dolar dialokasikan dengan mudah untuk belanja kapal selam nuklir tempur, sementara instrumen pendanaan adaptasi iklim bagi negara-negara kepulauan yang terancam tenggelam terus mengalami defisit komitmen.

Meskipun demikian, kajian ini membuktikan bahwa negara-negara kepulauan Pasifik berhasil mendemonstrasikan kapasitas agensi asimetris (asymmetric agency) yang sangat tangguh. Mereka menolak diperlakukan sebagai objek atau pion tak berdaya dalam papan catur Perang Dingin Baru. Melalui doktrin kebijakan luar negeri "Friends to all, enemies to none" dan strategi strategic hedging, mereka secara cerdas memanfaatkan persaingan kekuatan besar untuk memaksimalkan bantuan pembangunan infrastruktur domestik tanpa harus mengorbankan independensi kedaulatan teritorial mereka. Melalui rekonseptualisasi identitas menjadi benua maritim The Blue Pacific, negara-negara kepulauan Pasifik bertransformasi menjadi aktor normatif global yang berhasil mendikte tata kelola perikanan dunia, menolak hegemoni institusional sepihak Tiongkok, serta memenangkan pengakuan hukum internasional di ITLOS atas keabadian batas wilayah laut kedaulatan mereka.

Rekalibrasi Paradigma Keamanan Kekuatan Besar (AS, Tiongkok, Australia): Kekuatan-kekuatan hegemoni global harus menghentikan upaya militerisasi sepihak di kawasan Pasifik Selatan. Kemitraan strategis yang legitimate dan berkelanjutan dengan kawasan ini hanya dapat dibangun apabila kekuatan eksternal bersedia menyelaraskan prioritas keamanannya dengan Deklarasi Boe 2018. Washington, Canberra, dan Beijing harus mengalihkan sumber daya material mereka dari perlombaan alutsista menuju pembiayaan konkret transisi energi hijau, pembangunan infrastruktur tanggul laut tahan iklim, serta pemenuhan kewajiban kompensasi Loss and Damage Fund.

Penguatan Solidaritas Institusional Regionalisme Pasifik (PIF): Forum Kepulauan Pasifik perlu memperkokoh protokol tata kelola keamanan internal guna mengantisipasi taktik divide-and-rule (pecah belah) dari kekuatan eksternal. Kesepakatan keamanan bilateral apa pun yang dilakukan oleh negara anggota (seperti kasus Kepulauan Solomon atau Papua Nugini) harus memiliki mekanisme transparansi regional agar tidak menciptakan instabilitas keamanan bagi negara-negara tetangga di sekitarnya.

Peran Kepemimpinan Maritim Indonesia: Pemerintah Indonesia hendaknya mempercepat realisasi visi diplomasi Pacific Elevation dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dengan 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent. Indonesia berpeluang menjadi juru bicara dan jembatan diplomatik tangguh bagi negara-negara samudra berkembang di forum internasional (G20 dan PBB), menggalang koalisi keadilan iklim global, sembari memperkuat patroli kedaulatan maritim di sepanjang perlintasan ALKI III demi menjamin terwujudnya kawasan Samudra Pasifik yang damai, stabil, dan bebas senjata nuklir.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisley, N. (2023). AUKUS, the Indo-Pacific and the regional security order. *Australian Journal of International Affairs*, 77(4), 365–373. <https://doi.org/10.1080/10357718.2023.2234561>
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dziedzic, S. (2022, April 19). Solomon Islands signs controversial security pact with China, defying Australian and US warnings. ABC News. <https://www.abc.net.au/news/2022-04-19/solomon-islands-china-security-pact-signed/101000258>
- Dziedzic, S. (2023, Mei 22). US and Papua New Guinea sign landmark defence agreement as geopolitical competition heats up. ABC News. <https://www.abc.net.au/news/2023-05-22/us-papua-new-guinea-sign-defence-cooperation-agreement/102377042>
- Fry, G. (2022). AUKUS and the Pacific: Breaking the nuclear taboo. *Asia & the Pacific Policy Society: Policy Forum*. <https://www.policyforum.net/aukus-and-the-pacific/>
- Fry, G., & Tarte, S. (Eds.). (2015). *The New Pacific Diplomacy*. ANU Press. <https://doi.org/10.22459/NPD.12.2015>
- Hau'ofa, E. (1994). Our sea of islands. *The Contemporary Pacific*, 6(1), 148–161. <http://www.jstor.org/stable/23701593>
- Herr, R., & Bergin, A. (2011). *Our Near Abroad: Australia and Pacific Island Regionalism*. Australian Strategic Policy Institute (ASPI).
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World Politics*, 30(2), 167–214. <https://doi.org/10.2307/2009958>
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton & Company.
- Pacific Islands Forum. (1985). *South Pacific Nuclear Free Zone Treaty (Treaty of Rarotonga)*. Suva: Pacific Islands Forum Secretariat.
- Pacific Islands Forum. (2018). *Boe Declaration on Regional Security*. Suva: Pacific Islands Forum Secretariat. <https://www.forumsec.org/boe-declaration-on-regional-security/>
- Pacific Islands Forum. (2022). *2050 Strategy for the Blue Pacific Continent*. Suva: Pacific Islands Forum Secretariat. <https://www.forumsec.org/2050-strategy/>
- Rajesh, M., & Dayant, A. (2023). *Pacific Aid Map: Geopolitical Competition and Development Dynamics*. Sydney: Lowy Institute. <https://pacificaidmap.lowyinstitute.org/>
- Smith, G. (2022). China's grand strategy in the South Pacific: From aid to security. *The Pacific Review*, 35(4), 621–645. <https://doi.org/10.1080/09512748.2021.1985472>
- Wallis, J. (2023). *Pacific Power? Australia's Strategy in the Pacific Islands*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Wesley, M. (2021). The contested Pacific: Great power rivalry in an oceanic domain. *Australian Journal of International Affairs*, 75(2), 133–149. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1867175>
- Wæver, O. (1995). Securitization and desecuritization. In R. D. Lipschutz (Ed.), *On Security* (pp. 46–86). New York: Columbia University Press.
- Zhang, D. (2020). China's military engagements with Pacific Island countries. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 7(3), 295–312. <https://doi.org/10.1002/app5.311>